Penggunaan *Strict Liability* Dalam Pertanggungjawaban Secara Perdata Pada Sengketa KLHK Melawan PT. Waringin Agro Jaya

Denis Kurniawan

Universitas Indonesia, Jakarta

Deniskurniawan99@gmail.com

Abstract. The right to access a good and healthy environment is a right for all citizens guaranteed by the 1945 Constitution. The right to obtain a good and healthy environment is not only limited by the rights of the current generation but also a right that future generations can feel with pro-environment sustainable development. The state's right to sue the central government through the Ministry of Environment and Forestry is an effort to protect the environment from polluters and/or environmental destroyers, one of which is filing a civil lawsuit. This research is a normative or doctrinal legal research with a statute, conceptual, and case approach. This study concludes that the legal liability carried out by PT Waringin Agro Jaya can be justified based on strict liability because, in principle, strict liability is a liability without fault in every business or activity categorized as Abnormally Dangerous Activity.

Keywords:

Civil Liability; Absolute Liability; Ministry of Environment and Forestry.

Abstrak. Hak untuk mendapatkan akses lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak untuk seluruh warga negara yang dijamin oleh UUD 1945. Hak untuk mendapatkan lingkungan baik dan juga sehat yang tidak hanya dibatasi oleh hak generasi saat ini, melainkan juga merupakan hak yang dapat dirasakan oleh generasi yang akan mendatang dengan adanya pembangunan berkelanjutan yang berpihak terhadap lingkungan. Hak gugat Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan upaya negara dalam melindungi lingkungan hidup dari pelaku pencemar dan/atau perusak lingkungan dengan salah satunya melayangkan gugatan secara perdata. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban secara hukum yang dilakukan PT Waringin Agro Jaya dapat dibenarkan berdasarkan *strict liability*, karena pada prinsipnya *strict liability* sebagai merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan pada setiap usaha atau kegiatan yang dikategorikan sebagai *Abnormaly Dangerous Activity*.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Perdata; Pertanggungjawaban Mutlak; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pendahuluan

Hak atas lingkungan yang baik dan sehat serta hak atas pembangunan yang berkelanjutan merupakan bagian dari jaminan konstitusional yang diberikan oleh negara kepada seluruh warga negaranya. Hal ini tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Selain itu, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa penyelenggaraan perekonomian nasional harus didasarkan pada prinsip demokrasi ekonomi yang menjunjung tinggi kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, keberlanjutan, kepedulian terhadap lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹

Pengaturan tersebut memiliki peran penting bahwasanya tidak hanya hak untuk hidup saja yang menjadi tanggung jawab pemerintah akan tetapi juga menyangkut persoalan hak lingkungan hidup yang sehat dan layak juga menjadi persoalan pemerintah sebagaimana hak untuk hidup (*right to life*) dan kemerdekaan pribadi (*personality liberty*) yang diatur oleh Konstitusi India juga ditafsirkan oleh Mahkamah Agung India meliputi hak untuk lingkungan yang sehat (*right to a wholesome environment*) dengan terbatasnya ruang bumi dan kondisi lingkungan yang semakin memprihatinkan maka tidak berhaknya industri atau korporasi dalam mencemari lingkungan dan membawa bahaya bagi masyarakat yang tinggal pada industri tersebut.²

Pembangunan berkelanjutan yang berbasis lingkungan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada generasi yang

¹ Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Pan Mohammad Faiz, "Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (Desember 2016): 771-772. <https://doi.org/10.31078/jk1344>.

akan mendatang yang juga mengharuskan mendapatkan kehidupan lingkungan yang layak dan meminimalisir terjadinya perubahan iklim. Kajian *International Panel of Climate Change* menyimpulkan bahwa generasi yang akan mendatang sangat rentan dan dirugikan terhadap bahaya perubahan iklim atas perbuatan yang dilakukan oleh generasi masa sebelumnya. Kajian WHO dengan The World Bank, University Collage London dan China's Tsinghua University juga menyimpulkan bahwa kerentanan akibat perubahan iklim ini akan membawa dampak kepada anak-anak yang kekurangan nutrisi dan penyebaran berbagai penyakit yang dipengaruhi situasi iklim yang berubah-ubah.³

Surna T. Djajadiningrat sebagaimana dikutip Pan Mohamad Faiz *sustainable development* bertumpu kepada faktor kondisi dari sumber daya alam, kualitas lingkungan, dan kependudukan.⁴ Pembangunan berkelanjutan haruslah berwawasan lingkungan agar pembangunan negara dapat diminimalisir risikonya, dan tidak membawa dampak negatif yang besar yang berorientasi kepada rusaknya alam dan lingkungan sehingga hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik tidak dapat dirasakan oleh generasi yang akan mendatang. Kesadaran secara internasional pun telah dilakukan sebagaimana pada 28 Juli 2022 Rapat umum PBB mendorong atas resolusi PBB A/76/L75 untuk mengampanyekan lingkungan yang sehat, bersih, dan berkelanjutan sebagai ajaran hak asasi manusia secara universal.⁵

³ Zefanya A. Sembiring, "Hak Generasi Masa Depan dalam Hukum Perubahan Iklim: Sebuah Penelusuran Awal," *Jurnal Hukum Lingkungan* 9, no. 1 (Oktober 2022): 26. <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.466>.

⁴ Pan Mohammad Faiz, "Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (Desember 2016): 773. <https://doi.org/10.31078/jk1344>.

⁵ Sayyidatihiyaa Afra Geubrina Raseukiy, "Kebijakan Hukum dalam Pemenuhan Hak atas Lingkungan yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan Sebagai Hak Asasi Manusia Universal," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 9, no. 1 (Oktober 2022): 3. <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.508>.

Tanggung jawab manusia untuk memelihara lingkungan hidupnya yang memadai juga meliputi adanya penegakan hukum lingkungan atas pelanggaran yang terjadi yang berakibat kepada rusaknya lingkungan di masyarakat. Danusaputro secara luas mengartikan lingkungan hidup sebagai semua benda, daya, dan kondisi termasuk manusia atas perbuatannya yang memiliki pertanggungjawaban dan mempengaruhi keberlangsungan hidup kesejahteraannya dan makhluk hidup lainnya. Adapun Soemarwoto sebagaimana dikutip Khalisah dan Serlika mengartikan lingkungan hidup sebagai ruang/dimensi yang dihuni secara Bersama-sama oleh makhluk hidup, baik itu manusia, tumbuhan, binatang dan makhluk hidup lainnya, bahkan terdapat benda tak hidup seperti gas, uap, batu, tanah dan hal lainnya didalamnya.⁶ Sedangkan Perspektif pengaturan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU PPLH") mendefinisikan *Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.*⁷

Permasalahan lingkungan kerap terjadi, begitupun saat ini berdasarkan data *Index Quality AIR* 5 tahun terakhir hingga 2022, Kualitas udara di Indonesia menempati posisi 26 sebagai negara paling berpolusi di dunia dengan rata-rata kualitas udara tahunan melampaui 5-10 kali lipat dari standar panduan WHO, bahkan pada 2019 pernah dikategori lebih dari 10 kali

⁶ Khalisah Hayatuddin dan Serlika Aprita, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Kencana, 2020), 4.

⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059.

lipat melampaui panduan WHO.⁸ Walaupun tidak menempati posisi 10 besar terparah, akan tetapi hak warga negara untuk mendapatkan kelayakan lingkungan udara yang bersih menjadi utopis dan belum terjamin oleh peran negara. Bahkan hal inilah yang mendasari adanya gugatan warga negara (*citizen law suit*) kepada sejumlah instansi yakni Presiden, Menteri LHK, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur DKI Jakarta hingga upaya hukum kasasi dengan perkara nomor 2560 K/PDT/2023 kembali dimenangkan oleh warga negara yang terbukti pemerintah dengan sejumlah instansi terkait terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan mengharuskan menetapkan kebijakan strategis untuk memperbaiki kualitas udara di Indonesia.⁹

Sengketa atas penegakan hukum lingkungan kerap terjadi, tidak hanya pemerintah yang digugat oleh sejumlah masyarakat atas perbuatan melawan hukum karena abai dan lalai atas jaminan lingkungan hidup yang memadai. Akan tetapi, Pemerintah juga berperan dalam upaya menciptakan penegakan hukum lingkungan secara litigasi yang dilakukan oleh korporasi atas perbuatannya yang berakibat terjadinya kerusakan lingkungan, sebagaimana pada Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel PT Waringin Agro Jaya dihukum berdasarkan *strict liability* dengan membayar ganti rugi materil kepada negara sejumlah Rp. 173.468.991.700,00 (seratus tujuh puluh tiga milyar empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) dan melakukan pemulihan lingkungan hidup atas lahan yang terbakar seluas 1.626,53 Ha

⁸ IQAir, “Negara & Wilayah Paling Berpolusi di Dunia,” Tersedia pada <https://www.iqair.com/id/world-most-polluted-countries> 25 November 2023, Diakses Pukul 30 Mei 2024, Pukul 17.21 WIB.

⁹ CNN Indonesia, “MA Nyatakan Jokowi dkk Melawan Hukum di Kasus Polusi Udara,” Tersedia pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231116161204-12-1025162/ma-nyatakan-jokowi-dkk-melawan-hukum-di-kasus-polusi-udara>, Diakses Pada 25 November 2023 Pukul 17.41 WIB.

sebesar Rp. 293.000.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga milyar rupiah).¹⁰

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang terfokus pada doktrin yang merupakan campuran dari berbagai aturan, asas, norma, penafsiran, dan sejumlah nilai untuk menjawab pertanyaan penelitian.¹¹ Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), yang dikumpulkan/dikelola dengan penggunaan dokumentasi atau studi pustaka.

Hasil dan Pembahasan

Penegakan Hukum Lingkungan dalam Pertanggungjawaban Perdata

Hak untuk mendapatkan lingkungan yang layak dan juga memadai merupakan hak semua orang. Kepentingan manusia secara *antroposentrisme* yang menjadikan manusia memiliki keinginan untuk mendapatkan hak atas lingkungan yang memadai.¹² Penegakan hukum lingkungan sebagai *legal means* atau sarana hukum untuk menindak kerusakan lingkungan baik secara administrasi, perdata, atau pidana agar terjaminnya perlindungan hukum dan menjamin hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi tiap warga negara dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan untuk generasi akan mendatang. Penegakan hukum lingkungan diantaranya dapat dilakukan secara perdata. Mas Achmad Sentosa sebagaimana dikutip Prim Haryadi menformulasikan bahwa untuk menentukan individu atau suatu badan hukum dinyatakan bersalah dan

¹⁰ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel, 304.

¹¹ Andri Gunawan Wibisana dkk, *Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023), 18.

¹² Prim Haryadi, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 12.

mengharuskan bertanggungjawab atas kerugian yang di sebabkan adanya pencemaran/perusakan lingkungan, penggugat harus membuktikan terlebih dahulu adanya pencemaran, serta dengan adanya kaitan kerugian yang dialaminya.¹³

Hak untuk mendapatkan lingkungan yang layak dan juga memadai merupakan hak semua orang. Kepentingan manusia secara antroposentrisme yang menjadikan manusia memiliki keinginan untuk mendapatkan hak atas lingkungan yang memadai. Penegakan hukum lingkungan sebagai legal means atau sarana hukum untuk menindak kerusakan lingkungan baik secara administrasi, perdata, atau pidana agar terjaminnya perlindungan hukum dan menjamin hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi tiap warga negara dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan untuk generasi akan mendatang. Penegakan hukum lingkungan diantaranya dapat dilakukan secara perdata. Mas Achmad Sentosa sebagaimana dikutip Prim Haryadi menformulasikan bahwa untuk menentukan individu atau suatu badan hukum dinyatakan bersalah dan mengharuskan bertanggungjawab atas kerugian yang di sebabkan adanya pencemaran/perusakan lingkungan, penggugat harus membuktikan terlebih dahulu adanya pencemaran, serta dengan adanya kaitan kerugian yang dialaminya.

Gugatan secara perdataan ini diatur di dalamnya menyangkut ganti kerugian dan pembebanan suatu tertentu atas perbuatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Sebagaimana yang diatur dalam 1365 KUHPerdata atau BW bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk

¹³ Prim Haryadi, "Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (Maret 2017): 127. <https://doi.org/10.31078/jk1416>.

menggantikan kerugian tersebut". Sehingga unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah: (1) kesalahan, (2) kerugian, (3) hubungan kausalitas, dan (4) relativitas atau suatu keadaan. Pelanggaran lingkungan hidup dapat diajukan dengan adanya gugatan guardian, yakni gugatan pengawal lingkungan yang legal standingnya diberikan kepada organisasi lingkungan hidup (NGO), pemerintah pusat/daerah dan perorangan atau masyarakat warga negara yang memiliki kerugian demi kepentingan lingkungan hidup. Hak gugat ini juga telah dijamin melalui UU PPLH yang diharapkan ini bisa menumbuhkan kesadaran di semua lini aspek kenegaraan yang tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja melainkan juga di ranah grassroots dalam mengadvokasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sehat dan juga berkelanjutan untuk dapat dirasakan bagi generasi masa yang akan mendatang.

Penyelesaian sengketa lingkungan secara perdata, dapat ditempuh melalui pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non-litigasi) melalui Alternative Dispute Resolution seperti mediasi, rekonsiliasi dan lainnya. Akan tetapi penyelesaian sengketa melalui pengadilan baru dapat dilakukan setelah adanya upaya di luar pengadilan terlebih dahulu, hal ini dilakukan agar tidak adanya putusan yang berbeda antara putusan pengadilan dan non-litigasi, dan upaya non-litigasi seperti mediasi merupakan keharusan bagi para pihak yang berperkara sebelum dibacakan gugatan oleh penggugat yang berperkara. Adapun yang hendak dicapai dalam penyelesaian secara non-litigasi ialah mengenai bentuk dan besaran angka ganti rugi, upaya pemulihan atas terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan atau upaya jaminan yang diharapkan tidak terjadi dikemudian hari, dan upaya pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan.

Sengketa lingkungan kerap kali bukanlah sengketa yang sederhana, melainkan memerlukan beban pembuktian yang rumit, untuk menangani hal tersebut mahkamah agung juga telah mengupayakan diadakannya sertifikasi hakim lingkungan

untuk menghasilkan putusan yang memadai. Konsep pembuktian secara perdata merupakan pembuktian formil, dimana hakim hanya terikat kepada alat bukti yang sah dalam mengambil keputusannya. Pembuktian lingkungan terkadang memerlukan adanya bukti secara ilmiah (*scientific evidence*) yang didapat melalui sains dan/atau pengetahuan khusus, yang mana dalam perkara "Daubert v. Marrel Dow Pharmaceuticals Inc" majelis hakim pemeriksa perkara tersebut mengakumulasikan bahwa bukti ilmiah mengharuskan adanya: (1) teori atau metode ilmiah yang digunakan teruji kebenarannya dengan adanya bukti empiris, (2) teori atau metode ilmiah yang digunakan memiliki potensi adanya error/kesalahan yang rendah, dan (3) teori dan metode yang digunakan telah di reviu dan di publikasi dengan proses peer review yang ketat untuk menguji sejauhmana pengetahuan tersebut dapat dikatakan sebagai sains dan dapat dirujuk sebagai pembuktian di persidangan.

Pertanggungjawaban perdata terkait isu lingkungan dapat diklasifikasikan menjadi: (1) pertanggungjawaban berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan (2) pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*)". Perbuatan melawan hukum didasarkan kepada adanya suatu kesalahan (*liability based on fault*) karena dalam jenis ini secara prinsip tidak adanya unsur kesalahan maka tidak adanya pertanggungjawaban (*no liability without fault*). Berbeda halnya dengan pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability* unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan, selama adanya kerugian yang ditimbulkan atas adanya aktivitas yang berakibat tercemar/rusaknya lingkungan hidup maka orang atau badan hukum tersebut harus bertanggungjawab, dalam kasus Ryland melawan Fletceher memberikan standar seseorang atau badan hukum harus bertanggungjawab secara mutlak apabila terjadinya pencemaran yang diakibatkan dengan penggunaan bahan-bahan atau material over berbahaya.

Konsep Pertanggungjawaban mutlak diadopsi pada Pasal 88 UU PPLH bahwa "Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan". Pola yang dijalankan dalam pembuktian *strict liability* berbeda dalam prosedur hukum acara perdata pada umumnya, dengan bersandar kepada asas *actori in Cumbit Probatio* yang secara bebas ditafsirkan bahwa siapa yang menggugat maka ia yang wajib membuktikan. Banyak pakar menganggap bahwa *strict liability* diaktualisasikan menggunakan konsep pembuktian terbalik (*Res Ipsa Loquitur*) dalam hal ini maka pencemar/perusak lingkungan yang dibebankan sepenuhnya pembuktian untuk membuktikan bahwa aktivitasnya tidak mencemar/merusak lingkungan yang berdampak kepada lingkungan hidup yang tidak sehat. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat dibenarkan sebagaimana pernyataan Andri G. Wibisana dengan mengutip pendapat Hakim Baldwin bahwa *strict liability* tidak membebaskan seluruh penggugat dalam beban pembuktian melainkan ada 3 hal yang harus dibuktikan, yakni: (1) adanya kegiatan atau alat yang berbahaya, (2) situasi tertentu penggunaan alat/kegiatan tersebut memiliki resiko yang berbahaya, dan (3) kerugian yang dialami berasal dari alat/kegiatan terganggu.

***Strict Liability* dalam Putusan PN Jakarta Selatan No. 456/Pdt.G-LH/PN Jkt.Sel**

Perkara nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel merupakan sengketa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melawan PT Waringin Agro Jaya (PT WAJ) akibat kebakaran hutan di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, yang mana dalam sengketa tersebut dilakukan dengan pembuktian prinsip *Strict Liability*. Hak Gugat pemerintah didasarkan kepada Pasal 90 UU 32/2009 PPLH bahwa KLHK yang merupakan instansi

pemerintah pusat dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu atas usaha dan/atau kegiatan yang berdampak kepada kerugian lingkungan hidup karena tercemar/rusaknya lingkungan hidup tersebut. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 bahwa hak gugat pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri negara dibidang lingkungan hidup, yang digunakan apabila pencemaran/perusakan lingkungan hidup tersebut merupakan "*hak milik publik atau milik negara (misalnya pencemaran laut, pencemaran sungai, perusakan hutan lindung, pencemaran udara dll)*".¹⁴

Hak Gugat pemerintah melalui KLHK berdasarkan UU PPLH disebut sebagai bentuk pelaksanaan atas asas "tanggung jawab negara" dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Jaminan negara dalam memenuhi kebutuhan lingkungan hidup yang sehat dan baik untuk warga negaranya serta mengelola manfaat sumber daya alam yang sebaik-baiknya demi kesejahteraan masyarakat banyak merupakan amanat konstitusi begitupun halnya dengan upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah dalam mengawasi eksploitasi sumber daya alam yang terhindar dari timbulnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.¹⁵ Hak gugat pemerintah juga berkaitan dengan pertanggungjawaban keadilan lingkungan yang tidak hanya kepada intra generasi melainkan juga antar generasi untuk mendapatkan akses lingkungan yang sehat dan layak.¹⁶ Pada

¹⁴ BAB IV Pedoman Penanganan Perdata Lingkungan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

¹⁵ Dona Pratama Jonaidi dan Andri G. Wibisana, "Landasan Doktriner Hak Gugat Pemerintah terhadap Kerugian Lingkungan Hidup di Indonesia," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 1 (September 2020): 166. <http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v5i1.9>.

¹⁶ Nurnaningsih Amriani, "Hak Gugat Pemerintah Kota Langsa: Upaya Perlindungan Hutan Mangrove dalam Rangka Menegakkan Prinsip Keadilan Intra dan

perkara *a quo* Abdul Wahid Oscar selaku Ahli perdata yang diajukan KLHK mengungkapkan bahwa kapasitas negara dalam mewakili lingkungan hidup bukan untuk mewakili kerugian negara melainkan kerugian lingkungan hidup sebagai badan hukum tersendiri.¹⁷

Menariknya dari kasus ini walaupun dilakukan pembuktian secara *Strict Liability*, namun nyatanya KLHK selaku Penggugat mengajukan Gugatan secara PMH terhadap PT WAJ selaku Tergugat pada tanggal 18 Juli 2016 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Padahal seperti penjelasan diatas pertanggungjawaban secara PMH dengan pertanggungjawaban mutlak/seketika (*Strict Liability*) memiliki pemaknaan yang berbeda, karena unsur "kesalahan" tidak dibuktikan dalam pertanggungjawaban mutlak, dan berdasarkan Pasal 88 PPLH tidak semua perusakan/pencemaran lingkungan hidup dapat dilakukan pertanggungjawaban secara *Strict Liability* melainkan hanya aktivitas yang kriterianya menggunakan B3 (Bahan beracun berbahaya) menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

Gagasan Coleman sebagaimana dikutip Andri G. Wibisana, dalam kasus ini setidaknya beban pembuktian KLHK hanya kepada (1) kegiatan/aktivitas PT WAJ, (2) Letak kerugian yang dialami negara melalui KLHK, dan (3) kerugian tersebut kausalitas atas kegiatan yang dilakukan PT WAJ, sehingga unsur kelalaian ataupun kesalahan sebagaimana PMH tidak perlu dibuktikan atau setidaknya tidak menjadi dasar untuk dapat digugat untuk menuntut ganti rugi. Kegiatan yang berbahaya sehingga memerlukan pertanggungjawaban secara *Strict Liability* termasuk dalam cakupan sudah adanya upaya

Antar Generasi," *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* 16, no. 1 (Juni 2021): 118. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2169>.

¹⁷ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel.

hati-hati dari pelaku dalam menjalankan aktivitas/usahanya untuk meminimalisir resiko kerusakan/pencemaran lingkungan. Adapun pengklasifikasiannya kegiatan dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang berbahaya kriteria diantaranya adanya kemungkinan menimbulkan bahaya besar dari kegiatan tersebut dan tingkat bahaya lebih mendominasi daripada keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan tersebut.¹⁸

PT Waringin Agro Jaya (PT WAJ) merupakan badan hukum perseroan yang menjalankan usaha di bidang perkebunan. Secara hukum PT WAJ mengantongi sejumlah dokumen legalitas perizinan untuk menjalankan usahanya seperti¹⁹ Kerangka Acuan Analisa Dampak Lingkungan Hidup (KAANDAL) melalui Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir No. 416/KEP/B.LH/2008, lalu Kelayakan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), melalui Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 455/KEP/B.LH/2008, ada juga Izin Lokasi untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit melalui Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 146/KEP/I/2008, kemudian Izin Usaha Perkebunan (IUP) melalui Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 149/KEP/D.PERKE/2008, Sertipikat HGU di Desa Serdang dengan luas 560 Ha, dan Desa Kandis dengan luas 12.526 Ha, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Rencana Perkebunan dan Pabrik pengelolaan kelapa sawit, dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rencana Perkebunan dan Pabrik pengelolaan kelapa sawit.

Sengketa KLHK melawan PT WAJ ini terjadi dikarenakan adanya kebakaran hutan yang berlangsung tidak kurang dari 3 bulan berturut turut terhitung 7 Juli-20 September 2015 mencapai 826 titik panas (hotspot), diantaranya berada pada

¹⁸ Andri G. Wibisana, "Pertanggungjawaban Perdata untuk Kebakaran Hutan/Lahan: Beberapa Pelajaran dari Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) VS PT. Bumi Mekar Hijau (BMH)", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 1, no. 1 (Oktober 2016): 44-45. <https://doi.org/10.24970/bhl.v1i1.5>.

¹⁹ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel, 6 dan 7.

area perkebunan kelapa sawit milik PT WAJ seluas 1.626,53 Ha yang terdeteksi melalui MODIS Terra-aquo milik Nasa Amerika Serikat (AS).²⁰ Pertanggungjawaban sengketa ini dilakukan menggugurkan pembuktian secara *Strict Liability*, yang artinya tidak membuktikan adanya unsur kesalahan (*mens rea*) yang dilakukan PT WAJ dalam terjadinya kebakaran hutan tersebut, akan tetapi berdasarkan prinsip *Strict Liability* PT WAJ mengharuskan bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran tersebut dan membayar sejumlah ganti rugi untuk melakukan pemulihan atas kerusakan kepada lingkungan.

Kenapa pada akhirnya PT WAJ dibebankan pertanggungjawaban secara *Strict Liability* karena kebakaran hutan tersebut dan tanpa dibuktikan terlebih dahulu mengenai kesalahan yang dilakukan oleh PT WAJ pada peristiwa tersebut. Andri Gunawan Wibisana selaku Ahli Hukum Lingkungan yang dihadirkan oleh KLHK, memberikan pemahaman bahwa aktivitas yang digolongkan sebagai *ultra hazard* atau sangat berbahaya dapat dikenakan *Strict Liability*. Ahli dengan mengutip pendapatnya Kusnadi Hardja Soemantri beranggapan bahwa kriteria kegiatan “yang berdampak besar dan penting terhadap lingkungan” ditandai dengan adanya suatu kewajiban Andal pada usaha/kegiatan tersebut. Usaha/kegiatan yang mewajibkan Andal maka dalam literatur Amerika termasuk dalam cakupan *Abnormaly Dangerous Activity*²¹

Istilah Amdal atau yang saat ini disebut Amdal berdasarkan UU 32/1997 merupakan *kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan*

²⁰ Joshua Hari M., “Pertanggungjawaban Mutlak PT. Waringin Agro Jaya yang Mengakibatkan Kebakaran Hutan dengan Menuntut Ganti Rugi dan Tindakan Tertentu,” *Res Nullius Law Journal* 4, no. 2 (Juli 2022): 190. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v4i2.6819>.

²¹ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel, 199

keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan."²² Kegunaan amdal pada kegiatan yang beresiko tinggi diantaranya; *pertama*, untuk mencegah dan meminimalisir efek samping agar potensi SDA yang menjadi objek pengelolaan tidak rusak, terutama SDA yang tidak dapat diperbaharui. *Kedua*, mencegah terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan sehingga tidak terjadinya kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan rakyat yang dipertaruhkan atas kegiatan tersebut.²³

Konsekuensi logisnya walaupun dengan adanya anggapan bahwa dia tidak bersalah ataupun juga telah adanya upaya pencegahan namun perusahaan tersebut mengetahui kegiatan usahanya memiliki resiko berbahaya atau tingkat tinggi maka dia mau ataupun tidak suka tetap dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan *strict liability* karena pada dasarnya prinsip ini juga dikenal sebagai *liability without fault* (pertanggungjawaban tanpa kesalahan). Pertanggungjawaban secara *strict liability* pada kasus ini yang harus dibuktikan hanya mencakup adanya kerugian penggugat dan hubungan sebab-akibat/kausalitas yang disebabkan *abnormaly dangerous activity* tergugat (yang dalam konteks pengaturan Indonesia "menghasilkan limbah B3, menggunakan B3 atau menghasilkan ancaman yang serius terhadap lingkungan").²⁴

Menjadi suatu pertanyaan juga apakah kebakaran hutan bukanlah kondisi darurat ataupun juga *force majeure*, dimana kondisi ini sebagai bencana alam dan diluar dari batas manusia

²² Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059.

²³ Satria Sukananda dan Danang Adi Nugraha, "Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, (September 2020): 126. <https://doi.org/10.18196/jphk.1207>.

²⁴ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel, 204-205.

untuk dapat mencegahnya, yang seharusnya hal ini dapat membebaskan PT WAJ terbebas dari pertanggungjawaban perdata. Bencana alam sendiri merupakan keadaan darurat, yang menurut UU 23/1959 Prp dapat dikategorikan sebagai "darurat sipil". Darurat sipil merupakan darurat tingkat pertama dan ancaman bahayanya lebih rendah dibanding darurat militer maupun darurat perang, karena penyelesaiannya tidak memerlukan aparat militer dalam mengangkat senjata dalam menghadapinya.²⁵

Jimly Asshiddiqie menafsirkan sepenggal *state of emergency* sebagai suatu keadaan bahaya yang secara tiba-tiba mengancam ketertiban umum.²⁶ Adapun Andri Gunawan Wibisana beranggapan bahwa bencana alam atau dalam literatur hukum Romawi disebut sebagai *act of god* untuk dapat terbebas pertanggungjawaban secara hukum maka mengharuskan bencana alam tersebut memiliki kriteria: (1) ancaman yang serius, (2) tidak dapat diperkirakan terjadinya, diantisipasi, dan dicegah, serta (3) terbebas dari campur tangan ulah manusia.²⁷ UU 24/2007 Penanggulangan bencana juga mempersempit peristiwa bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor, sehingga tidak ada argumentasi yang kuat yang

²⁵ Denis Kurniawan, "Relevansi Penundaan Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, no. 1 (Maret 2023): 104. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.97-110>.

²⁶ Rizki Bagus Prasetio, "Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dan Perlindungan HAM," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 2 (Juli 2021): 331. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.327-346>.

²⁷ Andri G. Wibisana, "Tangan Tuhan di Pengadilan Dalih Bencana Alam dalam Pertanggungjawaban Perdata dalam Kasus Lingkungan," *Jurnal Hukum Pembangunan* 41, no. 1 (2011): 104-110.

mendukung kebakaran hutan sebagai bencana yang memaafkan pertanggungjawaban secara perdata.²⁸

Oleh karena itu, sudah tepat putusan PN Jakarta Selatan yang menyatakan PT Waringin Agro Jaya dihukum mengharuskan ganti kerugian dengan membayar ganti rugi materil kepada negara sejumlah Rp. 173.468.991.700,00 (seratus tujuh puluh tiga milyar empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) dan melakukan pemulihan lingkungan hidup atas lahan yang terbakar seluas 1.626,53 Ha sebesar Rp. 293.000.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga milyar rupiah) berdasarkan prinsip *strict liability*. Hal ini juga sejalan dengan pengaturan Pasal 49 UU 41/1999 tentang kehutan bahwa "*Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya*".²⁹ Sehingga tanpa adanya kesalahan sekalipun yang dilakukan PT Waringin Agro Jaya atas kebakaran hutan tersebut tidak luput menanggung pertanggungjawaban.

Kesimpulan

Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak tiap warga negara yang harus dijamin oleh konstitusi. Penjaminan akan hal tersebut adanya upaya penyelesaian sengketa untuk menegakan hukum lingkungan, diantaranya melalui mekanisme keperdataan baik yang diselesaikan secara pengadilan (litigasi) maupun diluar pengadilan (non-litigasi). Pertanggungjawaban secara perdata dalam hukum perdata maka adanya pertanggungjawaban dengan klasifikasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan *strict liability*. Pertanggungjawaban perdata yang diselesaikan berdasarkan prinsip *strict liability* seperti halnya PT Waringin

²⁸ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 066, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723.

²⁹ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara 3888.

Agro Jaya berdasarkan gugatan yang diajukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pembelajaran bahwa seorang/badan hukum tidak melepaskan diri dari pertanggungjawaban secara hukum atas aktivitas/usaha yang memiliki resiko tinggi atau *abnormally dangerous activity*.

Pustaka Acuan

- Amriani, Nurnaningsih. 2021. "Hak Gugat Pemerintah Kota Langsa." *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* 16 (1): 118.
- Andri Gunawan Wibisana, dkk. 2023. *Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Aprita, Khalisah Hayatuddin & Serlika. 2020. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Kencana.
- BAB IV Pedoman Penanganan Perdata Lingkungan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.
- Faiz, Pan Mohammad. 2016. "Perlindungan Terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 13 (4): 771-772.
- Haryadi, Prim. 2017. "Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 14 (1): 127.
- . 2022. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata*. d. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indonesia, CNN. t.thn. *MA Nyatakan Jokowi dkk Melawan Hukum di Kasus Polusi Udara*. Diakses November 25, 2023.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231116161204-12-1025162/ma-nyatakan-jokowi-dkk-melawan-hukum-di-kasus-polusi-udara>,.
- IQAir. 2023. *Negara & Wilayah Paling Berpolusi di Dunia*. November 25. Accessed Mei 30, 2024. pada

<https://www.iqair.com/id/world-most-polluted-countries> 25 November 2023.

- Kurniawan, Denis. 2023. "Relevansi Penundaan Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17 (1): 104.
- M, Joshua Hari. 2022. "Pertanggungjawaban Mutlak PT. Waringin Agro Jaya yang Mengakibatkan Kebakaran Hutan dengan Menuntut Ganti Rugi dan Tindakan Tertentu." *Res Nullius Law Jurnal* 4 (2): 190.
- Nugraha, Satria Sukananda & Danang Adi. 2020. "Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 126.
- Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara (Sembiring 2022) Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059.
- Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 066, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723.
- Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059.
- Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel, 199.
- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel, 204-205.
- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel, 304.
- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel, 6 dan 7.

- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel.
- Prasetio, Rizki Bagus. 2021. "Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dan Perlingungan HAM." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15 (2): 331.
- Raseukiy, Sayyidatihiyaa Afra Geubrina. 2022. "Kebijakan Hukum dalam Pemenuhan Hak atas Lingkungan yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan Sebagai Hak Asasi Manusia Universal." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 9 (1): 3.
- Sembiring, Zefanya A. 2022. "Hak Generasi Masa Depan dalam Hukum Perubahan Iklim: Sebuah Penelurusan Awal." *Jurnal Hukum Lingkungan* 9 (1): 26.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara 3888.
- Wibisana, Andri G. 2016. "Andri G. Wibisana, "Pertanggungjawaban Perdata untuk Kebakaran Hutan/Lahan: Beberapa Pelajaran dari Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) VS PT. Bumi Mekar Hijau (BMH)." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 1 (1): 44-45.
- Wibisana, Andri G. 2011. "Tangan Tuhan di Pengadilan Dalih Bencana Alam dalam Pertanggungjawaban Perdata dalam Kasus Lingkungan." *Jurnal Hukum Pembangunan* 41 (1): 104-110.
- Wibisana, Dona Pratama Jonaidi & Andri G. 2020. "Landasan Doktriner Hak Gugat Pemerintah Terhadap Kerugian Lingkungan Hidup di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5 (1): 166.